



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
ALAMAT : JL. BASUKI RAHMAT No.2 SAMARINDA**



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama/ Unit Organisasi : KPU Provinsi Kalimantan Timur

Tahun Anggaran : 2019

No.	Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu		
1.	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
2.	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	75%
3.	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%
4.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%
5.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu		
1.	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu	3%
Sasaran 3 : Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU		
1.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%

Samarinda, Januari 2019

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur

Muhammad Taufik, S.Sos., M.Si.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

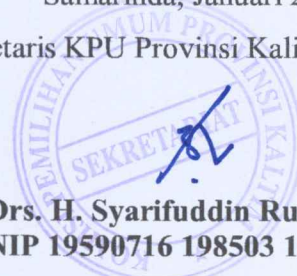
Nama/ Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran/Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan.	
Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan.	75%
Sasaran 2 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	2 Lap
Sasaran 3 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.	
Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.	20 Lap
Sasaran 4 : Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat.	
Persentase jumlah, jenis, alokasi, dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat.	100%
Sasaran 5 : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi.	
Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL.	77,50%
Sasaran 6 : Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga.	
Persentase Fasilitas Kerjasama KPU dan Lembaga lain.	77,50%
Sasaran 7 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien.	
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	77,50%
Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tenaga kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja.	75%
Sasaran 8 : Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan.	

Sasaran/Indikator Kinerja	Target
Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	100%
Sasaran 9 : Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur.	
Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu.	3 Aplikasi
Sasaran 10 : Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.	
Penataan Organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM.	90%
Sasaran 11 : Tersedianya Dokumen Kepegawaian.	
Pengelolaan database kepegawaian.	100%
Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.	
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	85%
Sasaran 13 : Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional, dengan indikator	
Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK.	100%
Sasaran 14 : Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (<i>Stock Opname</i>).	
Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan <i>asset</i> berdasarkan <i>stock opname</i> dengan tepat waktu	10 Kab/Kota
Sasaran 15 : Meningkatkan kapasitas personil pengelola BMN	
Persentase ketetapan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut.	100%
Sasaran 16 : Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut BPK, BPKP, dan APIP KPU.	
Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti.	87%
Sasaran 17 : Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP.	
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC.	80%
Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.	

Sasaran/Indikator Kinerja	Target
Persentase peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan	100%
Sasaran 19 : Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa.	
Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan.	87%
Sasaran 20 : Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum.	
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD.	89%
Persentase ketetapan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan anggota DPD.	89%
Sasaran 21 : Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	
Fasilitas monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden.	100%
Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.	1
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID.	10 Kab/Kota
Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014.	1 dokumen
Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih	3 kegiatan

Samarinda, Januari 2019
Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur


Drs. H. Syarifuddin Rusli, M. Si.
NIP 19590716 198503 1 018